

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pada tahun 1983 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Noor 0461/U/1983 menetapkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengacu kepada TAP MPR Nomor II/MPR/1983 sebagai bagian dari Pendidikan Pancasila. Dengan demikian maka Pendidikan Pancasila memiliki komponen Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Semuainya menunjukkan pengaruh kuat politik bangsa dalam menentukan kurikulum untuk mengamankan arah dan kebijakan pembangunan bangsa.¹

Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dan makin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.²

¹ Abdullah, Taufik dan A.B Lopian. et. all. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru Dan Reformasi*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. p 319

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Materi Latihan Kerja Guru Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas*. Jakarta. Depdikbud Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. p 8

Dalam bentuk mata pelajaran, PSPB baru diterapkan secara resmi pada kurikulum 1984. Sebelumnya dalam kurikulum 1975 yang merupakan kurikulum modern pertama yang dikembangkan menurut teori teori dan pengembangan kurikulum, PSPB belum menjadi mata pelajaran. Kurikulum 1975 dikembangkan berdasarkan suatu pendekatan baru dalam dunia pendidikan Indonesia yaitu pendekatan Integratif. Oleh karena berbagai mata pelajaran yang semula berdiri sendiri diorganisasikan dalam suatu organisasi baru dengan label Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi dan politik yang semula berdiri sendiri diorganisasikan sebagai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).³

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa adalah program pendidikan yang menggunakan aspek perjuangan bangsa dalam menegakkan dan meningkatkan martabat hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dengan bekal nilai-nilai perjuangan yang luhur. Penanaman dan pengembangan nilai-nilai perjuangan lebih ditekankan kepada perjuangan melawan penjajah.⁴

Selain tujuan umum yang merujuk pada rumusan tujuan pendidikan nasional, tujuan pengajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa adalah menyangkut pembentukan tiga matra, yaitu pengetahuan, sikap dan nilai serta pengetahuan. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa pada mulanya mengemban

³Abdullah, Taufik dan A.B Lopian.et.all. 2012.*Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru Dan Reformasi*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. p 319

⁴Asrowi.1991. *Kontribusi Motivasi Berprestasi dan Prestasi Belajar dalam Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Terhadap Sikap Kebangsaan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kotamadya Surakarta*. Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta. p 5

fungsi justifikasi eksistensi suatu bangsa, legitimasi, genetis dan fungsi didaktis. Ketiga fungsi tersebut diharapkan dapat mendukung masuknya ilham-ilham perjuangan pada anak didik, sehingga dapat membangkitkan motivasi berprestasi yang dapat direalisasikan dalam bentuk tingkah laku.⁵

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) tidak dapat dilepaskan dari sosok Nurgoho Notosusanto selaku pemrakarsa dan termasuk tim dalam penyusunan kurikulum PSPB. Nurgoho Notosusanto adalah orang yang pernah bergabung dalam perjuangan kemerdekaan pada usia empat belas tahun sebagai Tentara Pelajar. Kemudian ketika bergabung dalam organisasi militer buatan Jepang (PETA), Nurgoho menunjukkan rasa hormat terhadap gagasan-gagasan Jepang untuk masa perang, misalnya penekanan pada bushido atau semangat bertempur. Berbeda dengan satuan bersenjata lain, anggota Tentara Pelajar terdiri dari orang-orang nasionalis muda yang tidak berpolitik. Mereka setia kepada pemerintah Republik Indonesia dan bekerja sama dengan TNI. Pengalaman pada perang kemerdekaan inilah yang kemudian membuat Nurgoho memiliki pandangan tentang Generasi 1945. Pada surat yang ditulis Nurgoho kepada seorang penulis Belanda, Jef Last, Nurgoho menyampaikan pemikirannya yang membedakan generasi 1945 dengan generasi sebelumnya. Nurgoho menuliskan bahwa, tentara pelajar yang terdiri dari siswa sekolah menengah dan mahasiswa, dengan suka rela

⁵*Ibid*, p 5-6

meninggalkan bangku sekolah untuk kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan pribadi yaitu berjuang mati-matian untuk menyelamatkan bangsa.⁶

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa adalah pendidikan nilai yang bersumber pada sejarah perjuangan bangsa. Dengan demikian PSPB merupakan salah satu jalur penyampaian pendidikan Pancasila kepada murid di sekolah. Melalui PSPB juga para pendidik berusaha mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan kepada murid agar benar-benar terwujud dalam sikap dan perilaku sehari-hari.⁷

Sudut pandang lain, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) menjadi suatu bidang studi yang mempunyai banyak kontroversi. Selain banyaknya unsur orde baru yang bertujuan untuk menghilangkan unsur orde lama, kendali pemerintah juga berpengaruh dalam proses implementasi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Termaksud dalam bahan ajar bidang studi tersebut, buku “30 Tahun Indonesia Merdeka” hanya satu-satunya bahan ajar untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang digunakan guru untuk mengajar bidang studi tersebut.⁸

Sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo berpendapat bahwa buku “30 Tahun Indonesia Merdeka” tidak sesuai karena karya itu tidak diproduksi untuk

⁶ Katherine E. McGregor. *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat pp 84-85

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Materi Latihan Kerja Guru Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas*. Jakarta. Depdikbud Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. pp iii

⁸Ria Windi Safitri. 2016. *Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968-1998*. Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah. Universitas Negeri Surabaya. *Opcit*. pp 649

tujuan pendidikan. Dia bahkan berpendapat bahwa di negara lain isi buku ajar tidak ditentukan penguasa, melainkan berdasarkan kreativitas di luar struktur kekuasaan dan kemudian dievaluasi oleh pemerintah berdasarkan bagian-bagian yang perlu diperbaiki, seperti itulah yang menurutnya bisa diterima.⁹ Hal ini juga dapat menjadi permasalahan lain yang dialami guru ketika mengajar bidang studi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Dengan keadaan tersebut, membuat guru tidak bisa mengembangkan lebih jauh mengenai materi bidang studi tersebut.

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, pembatasan masalah dalam penelitian mencakup pembatasan temporal (waktu) dan batasan ruang. Batasan temporal yang ditetapkan oleh penulis adalah periode tahun 1983-1994 dan batasan wilayah untuk Provinsi DKI Jakarta.

Pokok permasalahan tersebut memunculkan berbagai macam pertanyaan yang akan difokuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Proses pelatihan dan persiapan guru pengajar Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa;
2. Apa metode mengajar Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa;
3. Apa pandangan guru bidang studi sejarah terhadap Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa;

⁹ Ibid. pp 649

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dasar pemikiran dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses menjadi guru mata pelajaran PSPB, metode pembelajaran serta sudut pandang guru sejarah DKI Jakarta mengajar mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa pada tahun 1989-1994

Kegunaan Penelitian

1. Secara akademik, menjadi sumbangan informasi dan landasan bagi pengembangan tema-tema penulisan sejarah orde baru dan penelitian sejarah
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi refleksi mengenai bagaimana proses dan pengalaman guru sejarah dalam proses mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran di tingkat universitas, juga untuk masyarakat umum.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis dan penyajian hasil penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif-naratif yang disusun secara sistematis.

Sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah, metode sejarah mempunyai empat tahapan yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik, interpretasi dan penulisan atau historiografi.¹⁰Dalam penelitian ini mengambil langkah-langkah berikut:

Heuristik

Pada tahap heuristic peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah.Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder.¹¹Sumber-sumber tersebut berupa sumber lisan hasil wawancara terhadap guru yang mempunyai pengalaman mengajar bidang studi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

Sumber lisan adalah bagian dari hasil metodologi Sejarah lisan. Sejarah lisan merekam pembicaraan orang mengenai sesuatu hal yang dibicarakan dan kemudian menganalisis hasil kesaksian mereka (memori) di masa lalu.¹²

Sejarah lisan diterapkan pada dua hal.Mengarah pada proses melakukan dan merekam wawancara dengan orang-orang untuk memperoleh informasi dari masa lalu. Sejarah lisan juga merupakan hasil dari wawancara, kemudian menjadi hasil narasi dari peristiwa masa lalu. Kemudian, kedua hal ini merupakan bentuk metodologi penelitian (sarana untuk melakukan penelitian) dan merupakan hasil

¹⁰Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta:Bentang. pp 91

¹¹Prof. A. Daliman, M.Pd. 2012.*Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta:Ombak. pp 55

¹² Abrams, Lynn. 2010. *Oral History Theory*. New York: Routledge. pp 1

proses penelitian. Dengan kata lain, ini adalah kegiatan mencatat dan membuat hasil catatan.¹³

Sejarah lisan memiliki empat tahap yaitu: wawancara lisan, perekaman hasil wawancara, penulisan transkrip dan interpretasi hasil wawancara.¹⁴

1. Wawancara

Wawancara adalah hubungan komunikatif yang menjadi hal utama dalam praktik pengambilan data. Pada proses ini, wawancara dilakukan oleh lima (5) orang guru yang memiliki pengalaman mengajar bidang studi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB)

2. Perekaman hasil wawancara dan penulisan transkrip

Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah merekam hasil wawancara dan kemudian membuat transkrip dari hasil rekaman ke bentuk dokumen. Seluruh hasil wawancara dengan guru pengajar Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dibuat transkrip dalam bentuk dokumen.

3. Interpretasi hasil wawancara

Tahap ini merupakan proses interpretasi hasil wawancara yang bertujuan untuk analisis dan perbaikan. Tahap ini juga menjadi proses untuk menjelaskan proses rekonstruksi sejarah atau analisis interpretasi lebih dalam.

¹³ Ibid, pp 2

¹⁴ Ibid, pp 9-14

Selain itu, untuk sumber primer juga ada arsip kebijakan dan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, juga ada publikasi dari media cetak mengenai topik penelitian pada tahun 1989-1994

Sumber sekunder yang digunakan adalah hasil buku-buku, tesis dan e-journal yang terkait dengan topik penelitian ini. Buku-buku dan tesis tersebut didapatkan dari Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Museum Satria Mandala. Sedangkan untuk e-journal dapat diakses secara online di portal jurnal universitas yang dituju.

Kritik

Pada tahap kritik sumber, peneliti melakukan kritik terhadap sumber yang telah didapatkan. Kritik tersebut dilakukan untuk menguji otentisitas (Kritik Ekstren) dan Kredibilitas sumber tersebut (Kritik Intern). Uji otentisitas penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data mengenai kapan, dimana, siapa, dari bahan apa sumber itu dibuat dan apakah asli atau tidak.¹⁵ Kritik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis peran informan yang diteliti, dan melakukan cek ulang informasi antar informan untuk membantu proses interpretasi. Selanjutnya, mengecek juga dari sumber literatur yang terkait dengan tema penelitian.

Interpretasi

¹⁵ Suhartono W. Pranoto. 2010. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. pp 36-37

Pada tahap interpretasi, peneliti menafsirkan isi sumber untuk mendapatkan verifikasi data yang digunakan untuk merekonstruksi sejarah yang akan ditulis. Interpretasi yang digunakan adalah cara melakukan analisis terhadap sejumlah fakta yang diperoleh melalui kritik sumber.¹⁶

Historiografi

Pada tahap akhir dalam proses penelitian ini yaitu historiografi. Historiografi (penulisan sejarah) yaitu mengungkapkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis dan jelas sesuai kaidah penelitian ilmiah.¹⁷

¹⁶ Sugeng Priyadi. 2015. *Historiografi Indonesia*. Yogyakarta:Ombak. pp 13

¹⁷Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta:Logos. pp 67